

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 6 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (8), (9), (11) Tentang Pemerintah Daerah, terdapat tiga dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu:

1. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan otonom daerah.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab pemerintah umum.

3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah otonom untuk melakukan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kawasan Daerah Provinsi.

2.1.2 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Pengertian Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006, yang direvisi dengan Permendagri No 77 Tahun 2020 efektivitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Menurut Mahmudi (2010:143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Ekasari (2020:21) menyatakan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara *output* (keluaran) dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap tujuan maka semakin efektif satu unit tersebut. Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Pernyataan lain dikemukakan juga oleh Bastian (2005:280) menyatakan bahwa efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menurut Djaenuri (2021:88) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 memberikan cakupan sumber PAD yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Ulum (2009:32) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.

Sedangkan menurut Mahmudi (2015:114) efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.

Dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pendapatan Asli Daerah adalah analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang mencakup pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang

sah, dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.

2.1.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Berikut ini uraian mengenai keempat sumber PAD tersebut:

1. Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kependingan umum. Artinya, Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam UU No 28 Tahun 2009 pasal 2, terdapat dua jenis pajak daerah yaitu Pajak Provinsi terdiri dari; Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan Pajak kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung

Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan. Retribusi ini berkaitan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Maka semakin banyak pelayanan yang dimanfaatkan oleh masyarakat akan semakin banyak pembayaran retribusi kepada pemerintah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan ditanggungjawabkan sendiri, yang meliputi; Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah menurut Halim dan Kusufi (2014:104-105) pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Pendapatan ini antara lain: Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, komisi, dan lain-lain.

2.1.2.3 Pengukuran Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Beni (2016:69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Adapun rumus untuk menghitung efektivitas adalah:

$$Efektivitas = \frac{Output\ Aktual}{Output\ Target} \geq 1$$

Keterangan :

- a. Apabila suatu hasil perbandingan antara *output* aktual dengan target *output* <1, maka efektivitas tidak tercapai.
- b. Apabila suatu hasil perbandingan antara *output* aktual dengan target *output* ≥ 1 , maka efektivitas tercapai.

Dalam Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan menggunakan rasio Efektivitas PAD. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan).

Menurut Mardiasmo (2009:21) Realisasi adalah proses menjadikan nyata, perwujudan, atau pelaksanaan yang nyata. Menurut Dedi Nordiawan (2010:115) Realisasi adalah proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dapat disimpulkan bahwa realisasi dan pendapatan asli daerah adalah suatu perwujudan/hasil pendapatan daerah dari proses yang sudah dianggarkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah menurut Tyasani Taras dan Luh Gede Sri Artini (2017) menyatakan

bahwa target PAD adalah besaran nominal/nilai objek pendapatan yang akan ditagihkan pada objek pendapatan yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Dengan kata lain target PAD merupakan sasaran yang akan diperoleh sesuai dengan yang sudah diperhitungkan.

Adapun pengukuran Efektivitas PAD menurut Halim (2012) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Eektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Sedangkan Perhitungan Efektivitas PAD yang dirumuskan menurut Mahmudi (2019:141):

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

Menurut Ulum (2019:32) kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah semakin baik. Secara umum, nilai Efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	
Kategori	Persentase
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	>75%

Sumber: (Mahmudi, 2016:141)

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2011:331) “pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat”. Artinya pertumbuhan ekonomi mengukur perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Meningkatnya kemampuan ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik kualitas maupun kuantitas. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga semakin berkembang. Selain itu, tenaga kerja akan bertambah sebagai akibat dari perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan.

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Ernita, 2013). Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang, sebab ukuran utama keberhasilan pembangunan dan hasilnya akan dapat dinikmati masyarakat sampai lapisan paling bawah.

Menurut Simon Kuznet mendefinisikan Pertumbuhan Ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang

ekonomi bagi penduduknya, kenaikan pada kemampuan ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya (Todaro dan Smith, 2012).

Menurut Sanjaya (2012), pembangunan merupakan suatu perubahan dari keterbelakangan menjadi kondisi yang lebih maju sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang mencakup berbagai perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional (Todaro, 2000). Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Menurut Yulianita (2009), salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu akan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah atau daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan dengan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah atau daerah tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu proses kenaikan kapasitas produksi baik barang atau jasa suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

2.1.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Menurut Sukirno (2011:332) ada empat faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah jika tidak memiliki sumber daya alam cenderung lambat dalam pembangunan.

b. Organisasi

Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktifitas. Dalam ekonomi modern para wiraswastawan berperan sebagai organisator dan pengambil resiko dalam ketidakpastian. Wirasastawan bukanlah manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain. Menurut Schumpeter, seorang wiraswastawan tidak perlu orang kapitalis. Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).

c. Akumulasi Modal

Modal adalah persediaan faktor produksi secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini, pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal

yang dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk daerah tersebut. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga membuka kesempatan kerja. Pembentukan modal ini pula yang membawa kearah kemajuan teknologi yang pada akhirnya membawa kearah penghematan dalam produksi skala luas dan membawa kearah penggalian sumber daya alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi.

d. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktifitas tenaga kerja modal dan sektor produksi.

e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas, keduanya membawa perekonomian kearah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya.

Sedangkan faktor non ekonomi diantaranya yaitu, faktor sosial, budaya dan politik. Yang memiliki pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi. Secara

umum ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya:

- a. Sumber daya alam
- b. Jumlah dan mutu pendidikan penduduk
- c. Ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Sistem sosial
- e. Pasar

2.1.3.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2011:335), ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi pemerintah menurut para ahli ekonom antara lain sebagai berikut:

1. Teori Sollow Swan

Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori Neo Klasik adalah Robert Sollow dan Trevor Swan yang berkembang sejak tahun 1950-an. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi bergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Menurut teori ini perekonomian akan berkembang tergantung pada pertumbuhan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi.

2. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-domar merupakan perluasan dari analisis *keynes* mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian cepat

tumbuh dan berkembang secara mantap (*steady growth*). Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi yaitu:

- a. Perekonomian alm pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan.
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- d. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save=MPS*) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal *output* (*capital output ratio = COR*) dan rasio antara perubahan modal *output* (*incremental capital-output ratio = ICOR*).

3. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter dikemukakan pada tahun 1934 dan diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul *The Theory Of Economic Development*. Selanjutnya Schumpeter menggambarkan teorinya tentang proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan dalam bukunya *Business Cycle*. Pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah proses inovasi yang dilakukan oleh inovator atau wiraswasta (*entrepreneur*).

2.1.3.4 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran yang secara umum digunakan dalam menghitung pertumbuhan adalah:

1. Rasio Pertumbuhan dalam satu tahun:

$$\text{Pertumbuhan (Growth Rate)} = \frac{\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Awal}} \times 100\%$$

2. Rasio Pertumbuhan dalam jangka waktu beberapa tahun:

$$\text{Compounded Annual Growth Rate (CAGR)} = \left(\frac{\text{Nilai Akhir}}{\text{Nilai awal}} \right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

Keterangan:

n = Jumlah Tahun

Dalam penelitian ini Indikatornya adalah menghitung Pertumbuhan Ekonomi pada setiap tahunnya dengan menggunakan rumus Pertumbuhan Dalam satu tahun *Growth Rate*.

Menurut Sukirno (2011:331) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara:

$$PE = \frac{PDRB_n - PDRB_{n-1}}{PDRB_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PDRB_n = Tahun yang dihitung

PDRB_{n-1} = Tahun sebelumnya

Pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

2.1.4 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.4.1 Keuangan daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No, 77 Tahun 2020 mendefinisikan bahwa keuangan daerah sebagai segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Yang dimaksud daerah disini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah otonomi ini terdiri dari pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten dan pemerintah Kota. Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari Pemerintah Pusat maka keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Dari definisi tersebut menurut Halim dan Kusyufi (2012:15) terdapat dua hal yang perlu dijelaskan:

1. Yang dimaksud dengan semua hak dan kewajiban adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikan kekayaan daerah.
2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam

rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum dan pembangunan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Menurut Halim dan Kusyufi (2012:21), seperti halnya pada pemerintah pusat, pada pemerintah daerah, pengurusan keuangan daerah juga diatur dengan membaginya menjadi peengurusan umum dan pengurusan khusus. Yang termasuk dalam pengurusan umum adalah APBD, sedangkan yang termasuk pengurusan khusus adalah pengurusan barang-barang inventaris kekayaan negara.

2.1.4.2 Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 Pasal 1 Ayat 2, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Kegiatan pengelolaan APBD dimaksud meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan atau pengendalian anggaran, termasuk pelaporan pelaksanaan anggaran, atas semua komponen atau struktur APBD yakni Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang kemudian direvisi dengan Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran kinerja berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam menentukan ukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD.

Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk:

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah,
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah,
- d. Melihat pertumbuhan, dan
- e. Perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian atas suatu program/kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang dapat diukur menggunakan indikator keuangan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah yang dijadikan variabel dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan dengan indikator keuangan berupa Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah gambaran pencapaian atas suatu program/kebijakan yang telah

direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang dapat diukur menggunakan indikator keuangan.

Kinerja keuangan daerah yang dijadikan variabel dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan dengan indikator keuangan berupa Kemandirian Keuangan Daerah.

2.1.4.3 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam hal ketergantungan daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat dan provinsi. Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah yang dibandingkan dengan penerimaan pusat.

Menurut Halim (2014:232) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Besar kecilnya pendapatan daerah dari pembayaran pajak dan retribusi oleh masyarakat berdampak pada kesanggupan pemerintah daerah dalam mendanai pemerintahannya sendiri seperti pembangunan dan pelayanan pada masyarakat sehingga dapat diketahui tingkat kemandirian keuangan daerah (Halim,2007).

Menurut Undang-undang No 9 Tahun 2015, Kemandirian Keuangan Daerah adalah pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah

dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah.

Dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah merupakan suatu kemampuan pemerintah daerah dalam hal pembiayaan dan pertanggungjawaban kegiatan operasional daerahnya yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila memiliki tingkat pendapatan asli daerah yang tinggi dan ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

2.1.4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Tangkilisan (2017:89) mengemukakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolok ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Bruto (PDBR)
2. Kemampuan dinas pendapatan daerah, kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau knja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

2.1.4.5 Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan keuangan daerahnya dapat dilihat dari seberapa besar kemandirian keuangan daerah. Daerah yang sudah berhasil dalam melaksanakan kemandirian keuangan daerah dapat melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa

mengharapkan dana transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Bantuan pusat dalam konteks otonomi daerah biasa dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut Pengukuran menurut Ulum (2009:31).

Rasio kemandirian daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

Hal yang sama dikemukakan Menurut Mahmudi (2015:140) rasio Kemandirian keuangan daerah dapat didefinisikan yaitu Rasio keuangan daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerahnya.

Rasio yang digunakan dalam kemandirian keuangan daerah menurut Mahmudi (2015:141) adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pada suatu periode anggaran tertentu.

Pendapatan Daerah berasal dari penerimaan dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli

Daerah serta lain-lain PAD yang sah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya Dana Perimbangan) terhadap total pendapatan. Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angka-angkanya. Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkaitan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka Kemandirian Keuangan Daerah semakin besar. Sebaliknya, jika makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah.

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Kinerja Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25%	Instruktif
Rendah	25 %– 50%	Konsultatif
Sedang	50% – 75%	Partisipatif
Tinggi	75% – 100%	Delegatif

Sumber : Halim, 2014

Menurut Halim (2014:168) hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang paling utama adalah hubungan pelaksanaan Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yaitu:

1. Pola Hubungan Instruktif

Pola hubungan instruktif berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

2. Pola Hubungan Konsultatif

Pola hubungan konsultatif berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan pemerintah pusat lebih banyak memberikan konsultasi.

3. Pola Hubungan Partisipatif

Pola hubungan partisipatif berarti peran pemerintah pusat semakin berkurang dan tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan ekonomi, peran pemerintah pusat beralih dari konsultasi menjadi partisipatif.

4. Pola Hubungan Delegatif

Pola hubungan delegatif dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah pusat memiliki keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Dalam memenuhi kebutuhan studi empiris, maka penulis menyajikan penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi penguat dan pendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

Achmad Tjahjono dan Rika Oktavianti (2016) dengan judul “Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi

DIY”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Secara simultan menunjukkan bahwa rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Renny Nur'ainy, Desfitriana, dan Rooswhan Budi Utomo (2013) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Studi Kasus Pada Kota di Jawa Barat”. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan dua faktor yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Maya Novitasari dan Lita Novitasari (2019) dengan judul “Pengaruh Pajak,Retribusi,DBH, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan DBH dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, DBH, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Siti Raun Kristina, Amran T. Naukoko, dan Hansly F. DJ Siwu (2021) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Halmahera Tengah, sementara untuk variabel Dana Perimbangan tidak mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. dan secara bersamaan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Eve Ida malau dan Eka Pratiwi Septania Parapat (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Ramona Leny Gaghana, Paulus Kindangen, dan Debby Ch. Rotinsulu (2018) dengan judul “Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Sulawesi Utara”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Sulawesi Utara.

Fadly Nggilu, Harijanto Sabijono, dan Victorina Tirayoh (2016) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai signifikansi 0,000 dan untuk variabel Retribusi Daerah juga berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai signifikansi 0,006. Kemudian secara simultan variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dimana variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mempunyai kontribusi sebesar 76% terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan sisanya sebesar 34% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi, (2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Dana Perimbangan

berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (4) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Krest D Tolosang (2018) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Tomohon.

Dian Budi Susanti, Sri Rahayu, dan Siska P. Yudowati (2016) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Riska Afiatul Affifah dan Sri Rahayu (2021) dengan judul “Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Dan Kota (Pada Provinsi Jawa Barat)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah mampu menjelaskan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 96,79%, sedangkan sisanya sebesar 3,21% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Hasil pengujian secara parsial, menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Sedangkan belanja modal dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil pengujian secara simultan, menunjukkan bahwa belanja modal, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Tessa Lonica karouw, Daisy S. M. Engka, dan Krest D. Tolosang (2022) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Retribusi Daerah Dan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kota Manado”. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Resti Puspita Laoli, Febri Valentinus Situmorang, dan Benny Rojeston Marnaek (2020) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Sumatra Utara”. Hasil penelitian menunjukan bahwa

pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan secara simultan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Nyoman trisna Erawati dan Leny Suzan (2015) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara parsial keempat komponen pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Afrizal Tahar dan Maulida Zakhiya (2011) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dana alokasi umum mempunyai pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan asli daerah dana alokasi umum dan kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Eny Wahyuni dan Lilis Ardini (2018) dengan judul “Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Arum Puspitasari dan Naila Rizki Salisa (2017) dengan judul “Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Studi Empiris Pada Kabupaten Se-Karesidenan Pati 2010-2016”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dan alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Anita Lestari, Nasrullah Dali, dan Muntu Abdullah (2016) dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Mutiah (2019) dengan judul “*The Effect of Regional Financial Independence, Regional Financial Efficiency and Effectiveness of Regional Original Income on Capital Expenditure*” Study in Provincial Level Regional Government in Indonesia 2013-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengeluaran modal, sedangkan efisiensi keuangan daerah tidak mempengaruhi pengeluaran modal dan efektivitas pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi pengeluaran modal.

Dowes Ardinugroho, Albertus Maqunus Soesilo, dan Mulyanto (2021) dengan judul “*The Effect of Regional Original Income, Balanced Funds and Regional Expenditures on Regional Financial Independence (Case Study in Central Java Province 2014-2018)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan (PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah) signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Berikut ini persamaan dan perbedaan atas penelitian terdahulu yang relevan sebagai pendukung pelaksanaan penelitian ini:

Tabel 2. 3

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama, Tahun Dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Achmad Tjahjono dan Rika Oktavianti (2016) Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus	Variabel Independen: - Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Dependen: - Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	Variabel Dependen: - Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus - Periode tahun penelitian - Subjek penelitian	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif	Kompartemen: Jurnal Kajian Bisnis Vol. 24, No. 1, Januari 2016 STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

	Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi DIY	Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Linier Berganda		terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Secara simultan menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	
2	Maya Novitasari dan Lita Novitasari (2019) Pengaruh Pajak,Retribusi, DBH, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen: - Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Dependen: - Pertumbuhan Ekonomi Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Variabel Dependen: Pajak,Retribusi, DBH, Belanja Modal - Periode tahun penelitian - Subjek penelitian	pajak daerah, retribusi daerah modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan DBH dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, DBH, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Akuntansi Vol. 3 No. 2 Oktober 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun
3	Eve Ida malau dan Eka Pratiwi Septania Parapat (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen: - Kemandirian Keuangan Daerah Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi data Panel	Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Belanja Modal - Periode tahun penelitian - Subjek penelitian	pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal EK&BI, Volume 3, Nomor 2 Desember 2020 ISSN: 2620-7443 E-ISSN: 2621-4695
4	Siti Raun Kristina, Amran T. Naukoko, dan Hansly F. DJ Siwu (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan Daerah Metode: Kualitatif	Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah - Dana Perimbangan - Periode tahun	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kemandirian	Jurnal EMBA Vol.9 No.1 Januari 2021 Universitas Sam Ratulangi

	Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah	Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	penelitian - Subjek penelitian	keuangan daerah Kabupaten Halmahera Tengah, sementara untuk variabel Dana Perimbangan tidak mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. dan secara bersamaan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.	
5	Renny Nur'ainy, Desfitriana, dan Rooswhan Budi Utomo (2013) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Studi Kasus Pada Kota di Jawa Barat	Variabel Independen: - Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Dependen: - Pertumbuhan Ekonomi - Subjek penelitian Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah - Periode tahun penelitian	secara parsial pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan dua faktor yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, & Teknik Sipil) Vol. 5 Oktober 2013 Bandung, 8-9 Oktober 2013 ISSN: 1858-2559
6	Ramona Leny Gaghana, Paulus Kindangen, dan Debby Ch. Rotinsulu 2018 Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap	Variabel Independen: - Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Dependen: - Pertumbuhan Ekonomi	Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah - Periode tahun penelitian - Subjek penelitian	Hasil Penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi dan	Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 (2018) Universitas Sam Ratulangi

	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Sulawesi Utara	Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Data Panel		pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Sulawesi Utara.	
7	Fadly Nggilu, Harijanto Sabijono, dan Victorina Tirayoh 2016 Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo	Variabel Independen: - Kemandirian Keuangan Daerah Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Variabel Dependen: - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Periode tahun penelitian - Subjek penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh secara positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai signifikansi 0,000 dan untuk variabel Retribusi Daerah juga berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai signifikansi 0,006. Kemudian secara simultan variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dimana variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mempunyai kontribusi sebesar 76% terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan sisanya sebesar 34% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04 Tahun 2016 Universitas Sam Ratulangi Manado
8	R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid 2018 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan	Variabel Independen: - Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah - Dana Perimbangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah	Jurnal Akuntansi Volume 13 (1) (Januari-Juni 2018) Universitas Siliwangi

	Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya)	Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	- Periode tahun penelitian - Subjek penelitian	pada Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi, (2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (4) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	
9	Krest D Tolosang 2018 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon	Variabel Independen: - Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Dependen: - Pertumbuhan Ekonomi Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah - Periode tahun penelitian - Subjek penelitian	Hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Tomohon.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No. 03 Tahun 2018 Universitas Sam Ratulangi, Manado
10	Dian Budi Susanti, Rahayu, Siska P. Yudowati 2016 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana	Variabel Independen: - Kemandirian Keuangan Daerah - Subjek penelitian Metode:	Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Periode tahun	Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	<i>e-Proceeding of Management</i> : Vol.3, No.3 December 2016 Universitas Telkom

	Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat)	Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Data Panel	penelitian	Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	
11	Riska Afiatul Affifah dan Sri Rahayu 2021 Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Dan Kota (Pada Provinsi Jawa Barat)	Variabel Independen: - Kemandirian Keuangan Daerah - Subjek penelitian Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah - Belanja Modal - Dana Alokasi Khusus (DAK) - Periode tahun penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah mampu menjelaskan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 96,79%, sedangkan sisanya sebesar 3,21% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Hasil pengujian secara parsial, menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan belanja modal dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil pengujian secara simultan, menunjukkan bahwa belanja modal, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	<i>e-Proceeding of Management</i> : Vol.8, No.2 April 2021 Universitas Telkom

12	Tessa Lonica karouw, Daisy S. M. Engka, dan Krest D. Tolosang (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Retribusi Daerah Dan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kota Manado	Variabel Independen: - Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Dependen: - Pertumbuhan Ekonomi Metode: Deskriptif Kualitatif Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Variabel Dependen: - Penerimaan Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Periode tahun penelitian - Subjek penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penerimaan retribusi daerah dan penerimaan pajak daerah di Kota Manado	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 22 No.4 Bulan Mei 2022 Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ruratalangi, Manado 95115, Indonesia
13	Resti Puspita Laoli, Febri Valentinus Situmorang, dan Benny Rojeston Marnaek (2020) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Sumatra Utara	Variabel Independen: - Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Dependen: - Pertumbuhan Ekonomi Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah - Periode tahun penelitian - Subjek penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sementara pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan secara simultan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 4 No. 3, 2020 Universitas Prima Indonesia, Medan
14	Nyoman trisna Erawati dan Leny Suzan (2015) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan	Variabel Independen: - Kemandirian Keuangan Daerah Metode: Kuantitatif Alat Analisis:	Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah - Periode tahun penelitian - Subjek penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara parsial keempat komponen	<i>e-Proceeding of Management</i> : Vol.2, No.3 Desember 2015 Page 3259 ISSN : 2355-9357 Universitas Telkom

	Daerah Bandung	Kota	Regresi Panel	Data	pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.		
15	Afrizal Tahar dan Maulida Zakhiya (2011)		Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi	Variabel Independen: - Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Dependen: Pendapatan Asli daerah Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Variabel Independen: - Pendapatan Asli daerah - Pertumbuhan Ekonomi - Periode tahun penelitian - Subjek penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dana alokasi umum mempunyai pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan asli daerah dana alokasi umum dan kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12 No. 1, halaman: 88-99, Januari 2011. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
16	Eny Wahyuni dan Lilis Ardini (2018)		Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen: - Kemandirian Keuangan Daerah Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda	Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah - Belanja Modal - Belanja Pegawai - Periode tahun penelitian - Subjek penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 7, Nomor 6, Juni 2018. e-ISSN : 2460-0585 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

keuangan daerah.					
17	Arum Puspitasari dan Naila Rizki Salisa (2017) Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Studi Empiris Pada Kabupaten Se-Karesidenan Pati 2010-2016	Variabel Independen: - Kemandirian Keuangan Daerah Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi linier Berganda	Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Periode tahun penelitian - Subjek penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dan alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	Accounting Global Journal: Vol. 1, No. 1 Oktober 2017. Universitas Muria Kudus
18	Anita Lestari, Nasrullah Dali, dan Muntu Abdullah (2016) Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan Daerah Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Linier Berganda	Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Periode tahun penelitian - Subjek penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap belanja modal. Dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Volume 1, Nomor 2, 2016 e-ISSN : 2502-5171
19	Mutiah 2019 <i>The Effect of Regional Financial Independence, Regional Financial Efficiency and</i>	Variabel Dependen: - Efektivitas Pendapatan Asli Daerah - Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen: - Pengeluaran Modal - Periode tahun penelitian - Subjek penelitian	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengeluaran modal, sedangkan efisiensi keuangan daerah tidak mempengaruhi pengeluaran modal	<i>European Journal of Emerging Markets, 9(2) Universitas Negeri Semarang ISSN 2086-3128</i>

	<i>Effectiveness of Regional Original Income on Capital Expenditure Study in Provincial Level Regional Government in Indonesia 2013-2017</i>	Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi berganda		dan efektivitas pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi pengeluaran modal.	
20	Dowes Ardinugroho, Albertus Maqnu Soesilo, dan Mulyanto 2021 <i>The Effect of Regional Original Income, Balanced Funds and Regional Expenditures on Regional Financial Independence (Case Study in Central Java Province 2014-2018)</i>	Variabel Independen: - Kemandirian Keuangan Daerah Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Dependen: - Pendapatan Asli Daerah - Dana Perimbangan Daerah - Belanja Daerah - Periode tahun penelitian - Subjek penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan (PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah) signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	<i>Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 4, No 2, May 2021, Universitas Sebelas Maret</i>

Dindin Muhammad Rahmanudin (2022) 183403136

Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Survei Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2021)

2.2 Kerangka Pemikiran

Salah satu tujuan adanya otonomi daerah yaitu sebagai kemandirian daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dari sumber pendapatan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian daerah juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber

dana pemerintah pusat, semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah.

Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya yang relatif sama untuk melihat bagaimana kondisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap daerah lain (Halim, 2007:232).

Menurut Halim (2014:232) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Menurut Undang-undang No 9 Tahun 2015, Kemandirian Keuangan Daerah adalah pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Dalam penelitian ini penulis meneliti beberapa hal yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah yaitu efektivitas pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah sumber penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pengelolaan dan pengoptimalan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dikelola dan dimanfaatkan secara efektif untuk pembiayaan daerah. Menurut Mahmudi (2015:114) Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.

Menurut Ulum (2009:32) menyatakan bahwa semakin tinggi Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Artinya, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan maka hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu melaksanakan kewenangan dalam bidang keuangan daerah dengan mengelola pendapatan, sehingga realisasi pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin berkurang.

Pengukuran kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besaran sumber pendapatan asli daerah karena pendapatan ini menggambarkan bagaimana keadaan potensi riil suatu daerah (Ramona Leny Gaghana, Paulus Kindangen, dan Debby Ch. Rotinsulu, 2018).

Berdasarkan dari keinginan untuk mewujudkan harapan tersebut, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pemerintah daerah berupaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah meningkatkan pelayanan publik,

memajukan perekonomian daerah dan untuk merealisasikan kemandirian keuangan daerah.

Secara teori kemandirian keuangan daerah adalah dengan mengurangi ketergantungan bantuan pada pemerintah pusat dan memaksimalkan potensi daerah salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah diharapkan kemandirian keuangan daerah dapat tercapai. Dari teori yang dijelaskan diatas diduga bahwa Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Raun Kristina, Amran T. Naukoko, dan Hansly F. DJ Siwu (2021) variabel Pendapatan Asli Daerah mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah, Ramona Leny Gaghana, Paulus Kindangen, dan Debby Ch. Rotinsulu (2018) Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid (2018) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Dian Budi Susanti, Sri Rahayu, dan Siska P. Yudowati (2016) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Akan tetapi dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Achmad Tjahjono dan Rika Oktavianti (2016) secara parsial menunjukkan bahwa rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, hal ini berbanding terbalik

dengan teori dan harapan bahwa pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

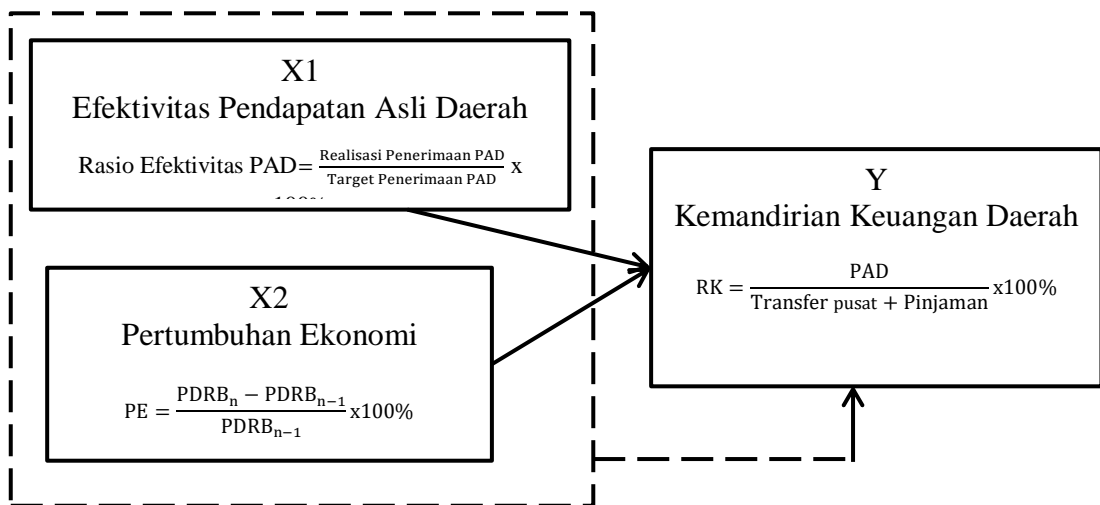
Selain Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, faktor lain dalam mewujudkan kemandirian daerah adalah Pertumbuhan Ekonomi. Menurut Sukirno (2011:331) pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Artinya pertumbuhan ekonomi mengukur perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah setiap periodenya maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan kemandirian keuangan daerah dengan adanya peningkatan perekonomian dimasyarakat diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta terciptanya kemandirian keuangan daerah.

Keberhasilan otonomi daerah diukur dari seberapa besar porsi sumbangan masyarakat lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika PDRB meningkat, maka hal ini akan mengindikasikan akan mendorong peningkatan PAD (Handayani & Erinos, 2020). Karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka kemandirian keuangan juga meningkat.

Dalam hal ini diduga terdapat hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemandirian keuangan daerah yang bertujuan untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat dan daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Renny Nur'ainy, Desfitriana dan Rooswhan Budi Utomo (2013) secara parsial pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, Ramona Leny Gaghana, Paulus Kindangen dan Debby Ch. Rotinsulu (2018) Secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, mengemukakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Artinya Pertumbuhan Ekonomi dapat meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah. Namun dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Krest D Tolosang (2018) pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, Maya Novitasari dan Lita Novitasari (2019) pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah., dan Tessa Lonica karouw, Daisy S. M. Engka, dan Krest D. Tolosang (2022) pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini berbanding terbalik dengan teori yang ada.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian terdahulu, Kerangka Pemikiran Teoritis penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan : _____ = Secara Parsial

----- = Secara Simultan

2.3 Hipotesis

Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian dengan kerangka pemikiran serta rumusan masalah penelitian ini, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
3. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.